

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

EMPAT PEMDA BORONG WTP

Makanan Pasien jadi Temuan BPK

GORONTALO -GP- Empat Pemerintah Daerah (Pemda) di Gorontalo masing-masing Pemerintah Provinsi, Pemkot Gorontalo, Pemkab Bone Bolango dan Pemkab Bone Bolango sama-sama meraih prestasi dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah. Empat Pemda itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan 2019.

Penyerahan Laporan Ha-

sil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan secara terpisah, kemarin (4/6). LHP Pemprov Gorontalo 2019 diserahkan BPK dalam rapat paripurna virtual di Deprov Gorontalo. Sementara LHP tiga Pemda diserahkan secara bersamaan di kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo BPK-RI.

Meski memberikan opini WTP, BPK tetap mendapatkan sejumlah temuan saat melakukan audit keuangan.

■ bersambung ke Hal. 7



(Foto: Irfan Qusairi/Gorontalo Post)

dari halaman 1

Untuk LHP tiga Pemda masing-masing Pemkab Bonebol, Pemkot Gorontalo, dan Pemkab Gorontalo, BPK mendapatkan permasalahan yang salah satunya terkait pengadaan makanan bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dalam penyampaiannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi mengatakan, saat melakukan audit pihaknya mendapatkan permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan dalam barang dan jasa. BPK menemukan permasalahan antara lain pertanggungjawaban belanja bantuan operasional sekolah (BOS) tidak tertera. Pengadaan bahan makanan pasien RSUD yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tanpa pelengkapan.

"Harga bahan melebihi harga satuan di kontrak dan realisasi melebihi nilai kontrak," ujar Rahmadi dalam sambutan tertulisnya.

Permasalahan lain yang juga didapat BPK menyikapi pengelolaan pendapatan dan belanja. BPK menjumpai adanya potensi retribusi persampahan dan tempat wisata yang belum dipungut, penggunaan langsung atas hasil pemungutan retribusi, penertiban SP2DTU nihil belum terbit, belum ada monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja modal, serta penerima hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban, penggunaan tidak sesuai NPD, pertanggungjawaban terlambat dan tidak lengkap.

BPK juga mendapati permasalahan berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan. Berupa pencatatan penerimaan dan pelunasan pinjaman yang tidak didukung surat

pengesahan BUD.

Pengelolaan kas, piutang dan persediaan juga menjadi permasalahan lain yang kut ditemukan BPK. Walau rekening bank belum ditetapkan kepala daerah, pencatatan dalam BKU dan penyortiran pendapatan tidak tertera, piutang sewa berlanjut-lanjut, serta masa kadaluarsa obat dan bahan medis habis pakai kurang dari 24 bulan saat diterima.

Persentase lain yang juga disoroti BPK terkait dengan pengelolaan aset tetap, kepatuhan pendapatan serta kepatuhan belanja modal.

Sementara itu, terhadap LHP atas pengelolaan keuangan Pemprov 2019, BPK juga mendapati sejumlah temuan. Salah satunya terkait dengan program pembangunan rumah layak huni (Mahyuni). BPK menyoroti pengenaan pajak sejumlah 10 persen.

"Biaya mahyuni yang masih dipotong pajak 10 persen membuat anggaran untuk mahyuni makin kecil," ujar Anggota VI BPK-RI, Prof. Hatis Achar.

Achir saat menyampaikan rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov 2019, di sidang paripurna Deprov.

Hal lain yang juga disoroti berkaitan dengan pengadaan material untuk mahyuni yang dinilai tidak mempedonani. Perspes tentang pengadaan barang dan jasa. Serta pembayaran yang masih dilaksanakan secara tunai.

Selain Mahyuni, ada tiga catatan lain dari BPK. Yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset tetap. Ini telah menjadi temuan berulang yaitu hibah aset yang belum diverifikasi.

Temuan lain soal kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. BPK menemukan ada pembayaran untuk ASN yang sudah dimutasi, pensiun, dan pensiun dini yang tidak didukung surat

Makanan Pasien jadi Temuan BPK

pemerintah daerah. Bagi Pemprov Gorontalo, capaian tahun ini menjadi Pemprov mendapat opini WTP 7 kali berturut-turut. Pemkab Bonebol juga mendapatkan 7 kali WTP berturut-turut. Sementara Pemkot Gorontalo 5 kali WTP berturut-turut. Paling banyak diraih Pemkab Gorontalo.

Mendapatkan WTP tahun ini, membuat Pemkab Gorontalo berhasil mendapatkan WTP 10 kali berturut-turut. Sedangkan WTP terbanyak yang diraih Pemda se Provinsi Gorontalo.

Apa prestasi itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengatakan, penghargaan RI, Penerimaan WTP ini membuktikan pengelolaan keuangan yang baik dari Pemkab Gorontalo.

"Alhamdulillah tadi kita barusan mendapatkan laporan hasil dari audit BPK, kita

mendapatkan lagi WTP dan kelegaan saya yang pertama periode terakhir, di tahun pertama sampai periode akhir kita meraih WTP berturut-turut," kata Nelson.

Nelson mengaku bangga sebab dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo meraih WTP terbanyak.

WTP dijanjikan 5 kali dan sebelumnya 5 kali jadi berarti saya bisa meneruskan hal yang bagus di pemerintahan ini, kalau yang baik kita jalankan," ujarnya.

Tidak hanya WTP, Nelson juga bangga was hasil kerja pemerintah Kabupaten Gorontalo berkesinambungan dengan hasil WTP.

"Tadi saya juga agak kaget, dimana data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 10 persen dibanding

daerah lain kita yang tinggi, kemungkinan kita turut meraih prestasi, tapi kalau dibandingkan dengan data yang awalnya 21,4 sekarang tinggal 18,3 persen, selain itu pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran kita di bawah angka penduduk terbanyak," tutur Nelson.

Bupati berharap raihannya WTP ini bisa menjadi penyemangat maklup berada di tengah pandemi covid-19.

Meski begitu, Nelson mengungkapkan beberapa catatan dari BPK untuk Pemkab Gorontalo yakni terkait pengelolaan aset, dan PAD.

"Karena itu rencana saya ke depan saya ingin melibatkan Dinas Pendapatan Daerah. Dan apa yang jadi rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti," pungkas Nelson, (wari/rmb/nat)

Kabgor-Pohuwato Salat Jumat...

dari halaman 1

harus ada pengurusnya. Kalau ada masjid yang tidak ada pengurusnya jangan dulu dibuka. Sebab tidak ada yang akan bertanggung jawab," tegas bupati.

Kedua, masjid harus ada data tentang jumlah tetap. Sehingga jika ada apa-apa pengurus masjid bisa tahu.

Pertanyaannya jika ada jumlah tetap salat di sini, jawabannya boleh. Tetapi harus lapak ke pengurus, sehingga jika terjadi (penyemburan) Corona maka kita pengumpul terdapat.

Selain itu pengurus rumah ibadah harus mengunakan permohonan rekomendasi untuk membuka tempat ibadah.

Tak hanya itu saja, dalam surat edaran tersebut Tempat Ibadah juga harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Seperti telah melakukan penyucian, dan disinfektan di seluruh masjid, menyediakan tempat wudhu, tersedia kamar mandi, serta persiapan lainnya. Untuk para jamaah pun harus memenuhi

(3/6) mulai melaksanakan salat zohor berjamaah di Masjid Agung Pohuwato, kompleks blok plan perkantoran Marha.

Dengan begitu, Bupati Syarif berharap masjid di daerahnya bisa kembali dibuka, melaksanakan salat berjamaah lima waktu dan salat Jumat. Hal serupa juga berlaku bagi tempat ibadah umat agama lain, seperti Pura, Vihara dan Gereja.

Hanya saja, ada ketentuan untuk melaksanakan ibadah di masjid, di sini seperti biasanya. Protokol kesehatan tetap diberlakukan, bahkan dengan ketat. Hal itu dilakukan agar kelas penyebaran virus korona.

"Sebelum melaksanakan aktivitas berjamaah di masjid, pemerintah desa dan tokoh masjid terlebih dahulu harus menyampaikan kesiapan untuk menjalankan protokol kesehatan di masjid, rumah ibadah lainnya.

Setelah peninjauan atau itu dilengkap, maka berkoordinasi dengan